

Ruang Sosial¹

Oleh:
Dr. Sutaryono²

Pada awal masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, kita disugahi perdebatan penggunaan istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Mengapa? Karena kedua istilah tersebut seolah-olah mempunyai orientasi yang berbeda, padahal sejatinya kedua istilah itu tujuannya sama. Merujuk pada berbagai sumber, baik *social distancing* dan *physical distancing* merupakan tindakan pembatasan segala bentuk kerumunan, menjaga jarak, menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk mengurangi penularan virus. Dalam konteks ini, kedua istilah tersebut objeknya adalah ruang sosial.

Penanganan Covid-19

Ruang sosial, menurut Lefebvre (1991) merupakan salah satu bentuk ruang di samping ruang fisik dan ruang mental. Ruang mental berupa mindset dan pola pikir, sedangkan ruang sosial adalah ruang fisik atau non fisik (virtual) yang merupakan media interaksi sosial dan dibentuk oleh tindakan sosial baik bersifat individual maupun kolektif.

Situasi ruang sosial masyarakat dalam penanganan Covid-19 saat ini pada posisi yang rentan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi perekonomian masyarakat, referensi informasi yang digunakan, perbedaan daya tangkap dan pemahaman terhadap pesan edukasi dalam penanganan Covid-19 hingga pada sentimen pribadi. Faktor-faktor tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kegaduhan bahkan konflik antar anggota masyarakat.

Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh terbesar dalam pensikapan situasi ini. Pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 diterima sebagai hal yang rasional dan perlu dilakukan. Hal ini dijumpai pada komunitas masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik, misal pada komplek-komplek perumahan. Pada masyarakat yang ada di kampung-kampung dengan tingkat pendidikan yang beragam, situasinya jauh berbeda. Praktik-praktik *lockdown* kampung secara ketat adalah

¹ Dimuat dalam Kolom Analisis, SKH Kedaulatan Rakyat, Jumát 6 Mei 2020 halaman 1

² Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

salah satu wujudnya. Pihak luar ataupun pihak-pihak yang tidak dikenal dilarang keras memasuki kampung dengan alasan apapun. Ironisnya, pos-pos penjagaan digunakan sebagai tempat ngumpul-ngumpul para relawan yang justru kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Bahkan dalam situasi tersebut para relawan banyak yang tidak mengenakan masker.

Kondisi perekonomian masyarakat secara jelas tergambar aktifitas anggota masyarakatnya. *Stay at home* dan *work from home* hanya bisa direalisasikan oleh anggota masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sementara itu, anggota masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung harus tetap melakukan aktifitas harian guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Referensi informasi yang digunakan dan daya tangkap pesan dari pihak eksternal menjadi faktor penentu dalam pengambilan kebijakan di masyarakat. Faktor ini menjadi titik krusial terjadinya perbedaan persepsi yang berujung pada disharmoni sosial. Utamanya pada berbagai aktifitas keagamaan dan mudik. Ketidakkompakan antar berbagai pihak dalam mensikapi himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadikan praksis keber-agama-an dan respon terhadap pemudikpun berbeda-beda. Penentuan kondisi kampung termasuk zona hijau, kuning atau bahkan merah, juga berbeda-beda antar pemuka agama dan tokoh masyarakat. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kecenderungan menyepelkan protokol Kesehatan dan himbauan pemerintah.

Di samping beberapa faktor di atas, kepentingan dan sentimen pribadi terkadang menyelinap dan mempengaruhi keputusan para relawan di lapangan maupun keputusan para tokoh masyarakat. Hal ini sangat tampak pada aktifitas keseharian masyarakat. Para petani yang biasanya bebas keluar masuk dengan jalan terdekat, terpaksa harus memutar melalui pintu masuk yang dijaga relawan. Warung-warung di dalam kampung yang biasanya pelanggan dari luar kampung bisa masuk, akibat kebijakan *lockdown* lokal, menjadi tidak bisa.

Kegagalan dalam mengelola berbagai faktor di atas dapat menimbulkan permasalahan baru yang justru bisa berdampak panjang pasca pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu evaluasi terhadap berbagai praksis penanganan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat perlu dilakukan secara serius, baik oleh para anggota masyarakat yang terlibat maupun oleh institusi pemerintah, utamanya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Jangan sampai modal sosial dan kegotongroyongan dalam penanggulangan pandemi Covid-19, yang ditunjukkan oleh Sebagian besar masyarakat kita, berubah menjadi gejala-gejala disharmoni sosial yang kontraproduktif.